

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Stewardship (*Stewardship theory*)

Teori stewardship lebih menggambarkan situasi dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengasumsikan adanya hubungan yang kuat kepuasan dan kesuksesan organisasi (Yoyo *et.al*, 2017: 60)

Pada *Stewardship Theory, model of man* ini didasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Pada teori stewardship terdapat suatu pilihan *antara perilaku self serving dan pro-organisational*, perilaku pelayan tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi adalah bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan *principal* dimana para steward berada. Steward akan menggantikan atau mengalihkan *self serving* untuk berperilaku kooperatif. Sehingga meskipun kepentingan antara steward dan *principal* tidak sama, steward tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sebab steward berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif, dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang dapat diterima.

Teori stewardship mempunyai akar psikolog dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Dalam teori Teori stewardship manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya. Hal tersebut dikarenakan steward merasa kepentingan bersama dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi . (Donalson,*et al* 1991) dalam (Yoyo, *et.al*,2017 : 54)

Teori stewardship dapat diterapkan pada akuntansi organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan (Thorton 2009) dan nonprofit lainnya (WILSON, 2010). Sejak awal tahun perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara steward dengan *principals* karena Teori stewardship sering disebut sebagai teori pengolahan (penatalayanan) dengan beberapa asumsi dasar (*Fundamental assumptions of stewardship theory*) sebagai berikut :. (Yoyo, *et.al*,2017 : 56)

| Manajer as | Stewards |
|----------------------------|--|
| Approach to Governance | Sociological and Psychological |
| Model of Human Behavior | CollectivisticPro-Organizational Trustworthy |
| Manager Motivated by | Principal Objectives |
| Manager- Principal Interst | Convergence |

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah suatu penyajian yang terstruktur tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi. Setiap laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi.(Hans *et.al*,2016:126). Berikut ini beberapa pengertian laporan keuangan menurut para ahli :

1. Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. (Harahap, 2016:105)
2. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan perusahaan pada suatu periode tertentu. (Kasmir, 2012:7)
3. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dari kinerja keuangan suatu entitas. (Hans, *et.al*, 2016:126)

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan Laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi dan sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang

dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas. (Hans, *et.al*, 2016:126).

Pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, terdapat 8 tujuan (Kasmir, 2014:11) yaitu :

- a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu priode tertentu.
- e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- g. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan
- h. informasi keuangan lainnya.

2.2.3 Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan

Pihak yang memerlukan laporan keuangan ada 5 pihak menurut (Kasmir,2014:18), yaitu:

- a. Pemilik

Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang sudah dibuat, adalah:

- Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.
- Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode
- Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan.

b. Manajemen

Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Dengan laporan keuangan yang dibuat :

- Manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode apakah telah mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak.
- Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan selama ini.
- Melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dimasa yang akan datang

c. Kreditor

Kepentingan pihak kreditor terhadap laporan keuangan antara lain:

- Pihak kreditor tidak ingin perusahaan yang dibiayainya mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut (macet).

- Pihak kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya.
- Pihak kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang diberikan justru menjadi beban nasabah dalam pengembaliannya apabila ternyata kemampuan perusahaan di luar dari yang diperkirakan.

d. Pemerintah

Pentingnya laporan keuangan bagi pemerintah adalah :

- Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya.
- Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini terlihat jumlah pajak yang harus dibayarkan secara jujur dan adil.

e. Investor ★

Dasar pertimbangan investor adalah dari laporan keuangan yang disajikan perusahaan, dalam hal ini investor akan melihat prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang akan diperolehnya serta perkembangan nilai saham kedepan. Setelah itu barulah investor dapat mengambil keputusan untuk membeli saham suatu perusahaan atau tidak.

2.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengolahan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan

bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam pasal 4 dikatakan pula bahwa pengolahan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pengertian laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Pusat
- b. Pemerintah Daerah
- c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat.
- d. Suatu organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyampaikan laporan keuangan.

Suatu laporan keuangan dikatakan berkualitas harus menjadi sebuah laporan keuangan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam

pengambilan keputusan dengan memenuhi Kriteria laporan keuangan yang dibutuhkan pengguna yaitu dengan memenuhi Karakteristik Kualitatif laporan keuangan: Relevan, Andal, Dapat dipahami, dan Dapat diandalkan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. (PP71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010). Dikatakan informasi relevan jika:

- Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
- Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
- Tepat waktu
- Lengkap

b. Andal

Laporan keuangan yang andal adalah Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta yang jujur, serta dapat diverifikasi dan Netralitas. Informasi mungkin relevan,

tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. (PP71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010)

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara eksternal dan internal. (PP71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010).

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. (PP71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010)

2.4 Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku sekarang adalah SAP berbasis akrual yang diatur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 (PP/71/2010) tentang standar akuntansi pemerintah.

SAP Berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan I,O, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran

berdasarkan basis yang ditetapkan dalam anggaran negara/ daerah. Alasan pembaharuan SAP adalah agar dapat menyediakan informasi yang lebih dalam menilai akuntabilitas pengelolaan sumber daya, menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas, serta membuat keputusan. Sistem akuntansi perlu dikembangkan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta mempertimbangkan kondisi pendukung yang diperlukan, terutama personil, dukungan teknologi informasi, prosedur dan tata kerja, bagan perkiraan standar dan lembaga atau organisasi pendukung (Darise, 2008:5).

2.5 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen laporan keuangan sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup sebagai realisasi anggaran terdiri dari : Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan. (PP71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010)

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (PP71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010)

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan kuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. (PP71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010)

d. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari:

1. Pendapatan L-O adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/kepada entitas pelaporan lain. Termasuk dan pertimbangan dan dana bagi hasil
4. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang hukan operasi biasa atau sering terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo

awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat dan daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari :

1. Penerimaan kas adalah semua aliran yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. (PP71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010)

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas. (PP71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010)

2.6 Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan amanat pasal 33 undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam undang-undang tersendiri. Sehingga pada tahun 2004 Pemerintah telah menetapkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara adalah proses identifikasi

masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional sesuai standar pemeriksaan. (Darise, 2008:271).

BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan objek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang objeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. (Darise, 2008:271).

2.7 Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada :

- a. Masyarakat.
- b. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa.
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman.
- d. Pemerintah.

2.8 Fungsi Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, fungsi laporan keuangan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Sebagai bahan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya alam serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada para SKPD selaku pengguna anggaran.

2. Manajemen

Membantu Kepala Daerah dan para pengguna anggaran untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan, dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kerja

Mengevaluasi Kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.9 Komitmen Organisasi, Kompetensi Pegawai dan Pemanfaatan Teknologi

2.9.1 Komitmen Organisasi

Konsep komitmen organisasi berkaitan dengan tingkat keterlibatan orang dengan organisasi dimana mereka bekerja dan tertarik untuk tetap tinggal dalam organisasi tersebut. (Wibowo, 2017:213).

Komitmen Organisasi adalah sebagai suatu tingkatan dimana individu mengidentifikasi dan terlibat komitmen mencerminkan perasaan bahwa apa yang dilakukan seseorang adalah penting. menurut (Greenberg dan Baron, 2003:160) dalam (Wibowo, 2017:213). Komitmen organisasi berkaitan dengan tingkat keterlibatan orang dalam organisasi dimana mereka bekerja untuk tetap tinggal dalam organisasi tersebut.

Sumber daya manusia organisasi merasakan bahwa organisasi dimana mereka bekerja adalah organisasi yang peduli kepada mereka dan menjadi tempat yang terbaik untuk bekerja. Keadaan ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia mempunyai komitmen pada organisasi (Wibowo, 2017:213).

Di dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Sumber Daya Manusia atau aparat yang memiliki komitmen sangat diperlukan untuk mengoptimalkan seluruh informasi yang dimiliki untuk membuat laporan keuangan yang baik dan andal. Selain itu lembaga pemerintah yang memiliki komitmen dalam penyajian laporan keuangannya akan selalu berupaya untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta memiliki informasi

yang berkualitas. Jadi jika komitmen suatu organisasi baik, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan dan andal. Setiap pegawai memiliki dasar dan perilaku yang berbeda tergantung pada komitmen organisasi yang dimilikinya. Pegawai yang memiliki komitmen tinggi akan melakukan usaha yang maksimal dan keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi. Sebaliknya Pegawai yang memiliki komitmen rendah akan melakukan usaha yang tidak maksimal dengan keadaan terpaksa.

komitmen organisasional sebagai derajat dimana karyawan percaya dan mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya). Dimensi Komitmen Organisasi ada 3 bagian menurut (Luthan, *et.al*, 2011:73) dalam (Wibowo,2017:215) yaitu :

- 1) *Affective commitment*, yang berkaitan dengan adanya keinginan untuk terikat pada organisasi. Individu menetap dalam organisasi karena keinginan sendiri Kunci dari komitmen ini (*want to*).
- 2) *Continuance commitment*, adalah suatu komitmen yang didasarkan akan kebutuhan rasional. Dengan kata lain, komitmen ini terbentuk atas dasar untung rugi dipertimbangkan atas apa yang harus dikorbankan bila akan menetap pada suatu organisasi. Kunci dari komitmen ini adalah kebutuhan untuk bertahan (*need to*).
- 3) *Normative Commitment*, adalah komitmen yang didasarkan pada norma yang ada dalam diri karyawan, berisi keyakinan individu akan tanggung jawab terhadap organisasi. Ia merasa harus bertahan karena loyalitas. Kunci

dari komitmen ini adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi (*ought to*).

Beberapa Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi, Mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi komitmen pada organisasi (Sopiah 2008:163):

1. Faktor Personal, misalnya : usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, kepribadian.
2. Karakteristik pekerjaan, misalnya : lingkup jabatan, tantangan dalam pekerjaan, konflik peran dalam pekerjaan, tingkat kesulitan dalam pekerjaan.
3. Karakteristik struktur, misalnya : besar atau kecilnya organisasi, bentuk organisasi seperti sentralisasi dan desentralisasi, kehadiran serikat pekerja dan tingkat pengendalian yang dilakukan organisasi terhadap karyawan.
4. Pengalaman kerja. pengalaman kerja sangat berpengaruh pada tingkat komitmen karyawan pada organisasi. misalnya : Karyawan yang baru beberapa tahun bekerja dalam organisasi tertentu memiliki kompetensi yang berbeda dengan yang sudah puluhan tahun.

Pekerja yang mempunyai komitmen organisasi adalah sangat berharga. Kita dapat memperoleh komitmen organisasi dari bawahan dengan memenuhi kebutuhan pokok pekerja, memberi perhatian pada orang disemua tingkat, mempercayai dan dipercaya, mentoleransi individualitas,

dan menciptakan bebas kesalahan. (Heller,1999:18) dalam Wibowo (2017:217)

2.9.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*liability*) (Wibowo, 2007:110). Kompetensi dapat didefinisikan sebagai perpaduan pengetahuan, keterampilan, sikap dan karakteristik lainnya atau kompetensi pribadi lainnya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah pekerjaan, yang bisa diukur dengan menggunakan standar yang telah disepakati dan dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan (Marwansyah, 2016:36). Untuk menilai kapasitas dan kompetensi pegawai dalam menilai suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari deskripsi jabatan. Pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional. Pegawai yang mempunyai inovasi dan gagasan yang tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan SDM melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai

(Murwansyah,2016:35) Pegawai yang kompeten tersebut mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

2.9.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi (TI) merupakan gambaran dari setiap teknologi yang membantu manusia dalam berkomunikasi, menyimpan, memanipulasi, menghasilkan dan menyebarkan informasi (Arad, Hamed dan Hoda, 2009) dalam (Novrial, 2015:6). Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*), *electonic commerce* dan lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

Teknologi sebagai selain teknologi komputer untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi yang dapat melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia, komputer juga mampu melakukan apa yang mungkin tidak bisa dikerjakan manusia.

Dalam penjelasan peraturan pemerintah nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan Daerah kepada berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Manfaat lain yang ditawarkan dalam

pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Sistem akuntansi di Pemerintah Daerah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatan waktu.

2.10 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Kualitas Laporan Keuangan” yang berfokus pada sektor publik sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Penelitian Hari Setiyawati (2013), menyatakan bahwa komitmen Manajer untuk Organisasi tidak mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.

Penelitian Muhamad Nuryanto dan Nunuy Nur Afiah (2013), menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan lebih besar dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi.

Dewi Andini dan Yusrawati (2015), menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Empat Lawang.

Noprial Valenra Maksyur (2015), membuktikan bahwa sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Indragiri Hulu.

Anwar, C. & Mukadarul D.M. (2015), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kasim, E.Y. (2015), menyatakan ada pengaruh yang signifikan dari kompetensi akuntan pemerintah terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Iskandar, *et.al*, (2017), Kompetensi sumber daya manusia dan penggunaa teknologi informasi tidak memiliki pengaruh positif da signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Nurmiati Irvan, *et.al*, (2017), kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan kinerja manajemen keuangan, sedangkan pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajemen keuangan

Nurlis dan Winwin Yadiati (2017), menyatakan bahwa terdapat kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh pada kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian Julita, Susilatri (2018), menyatakan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

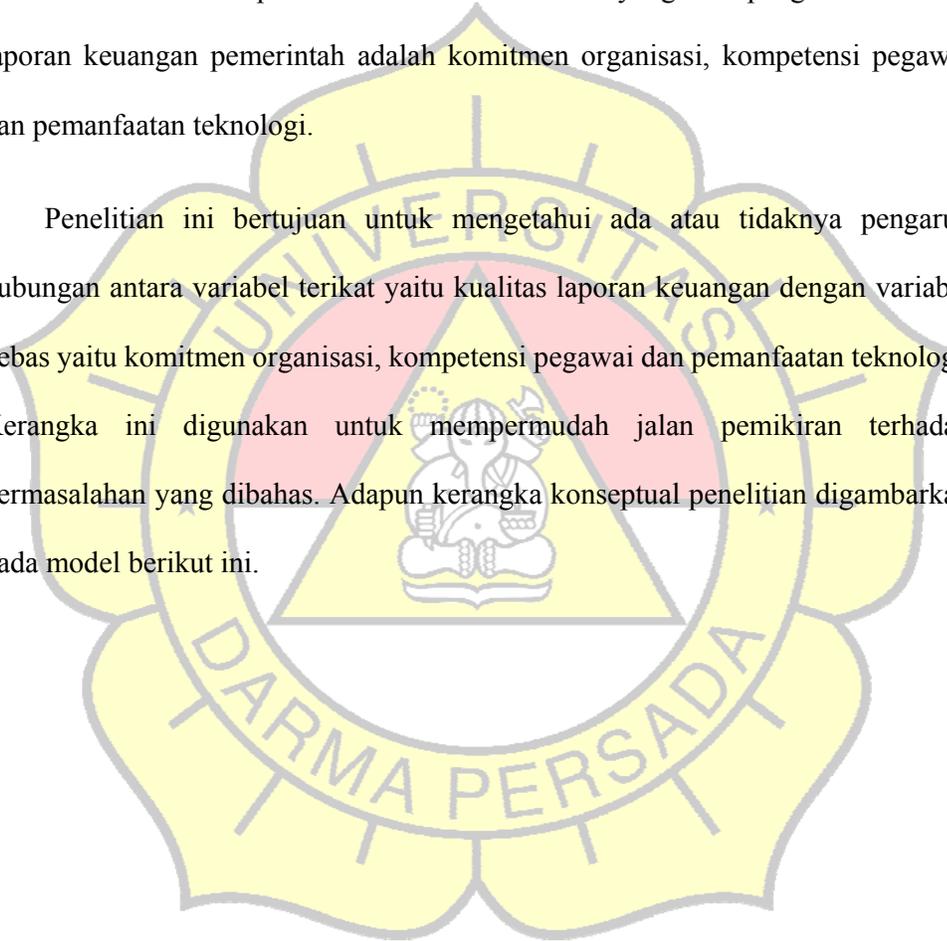
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

| No | Judul Penelitian | Penelitian (Tahun) | Hasil |
|----|---|--|---|
| 1 | <i>The effect of Internal Accountants' Competence, Managers' Commitment to Organizations and the Implementation of the Internal Control System on the Quality of Financial Reporting.</i> | Hari Setiyawati (2013) | Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Komitmen Manajer untuk Organisasi tidak mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. |
| 2 | <i>The Impact of Apparatus Competence, Information Technology Utilization and Internal Control on Financial Statement Quality (Study on Local Government of Jakarta Province - Indonesia).</i> | Muhamad Nuryanto dan Nunuy Nur Afiah (2013) | Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan lebih besar dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi. |
| 3 | Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (pada SKPD kabupaten empat Lawang Sumatera Selatan). | Dewi Andini dan Yusrawati (2015) | Hasil penelitian ini menyatakan bahwa berdasarkan pengujian secara simultan kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Empat Lawang. |
| 4 | Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu). | Noprial Valenra Maksyur (2015) | Hasil penelitian ini berdasarkan pengujian hipotesis membuktikan bahwa sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Indragiri Hulu. |
| 5 | <i>. The Influnce of Human Resource, Commitment Leader, The use of Information Technology, and System Internal Contro on the Quality of Local Government Financial Report Pringsewu</i> | Anwar, C. & Mukadarul D.M. (2015) | Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. |
| 6 | <i>Effect of Government Accountants Competency and Implementation of Internal Control to the Quality of Government Financial Reporting</i> | Kasim, E.Y. (2015) | Hasil penelitian berdasarkan Analisis Regresi Berganda menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari kompetensi akuntan pemerintah terhadap kualitas pelaporan keuangan. |
| 7 | <i>The Influence of Human Resources Competency and the use of Information Technology on the quality of Local Government Financial Report with Regional Accounting.</i> | Iskandar Muda, Deni Y.W, Erlina, Azhar M, Ade F.L, Rina B, Erwin A. (2017) | Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu |
| 8 | Effect of Human Resource Competencies, Information Technology and Internal Control Systems on Good Governance and Local Government Financial Management Performance | Nurmiati Irvan , Abdul Rahman Mus, Muhammad Su'un, Mukhlis Sufri (2017) | Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan kinerja manajemen keuangan, sedangkan pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajemen keuangan |
| 9 | <i>Technology Utilization and Human Resources Competence on Local Government Financial Reporting Quality (Survey on SKPD Banten Provincial Government and Serang City).</i> | Nurlis dan Winwin Yadiati (2017) | Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan, sedangkan Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh pada kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. |
| 10 | <i>Analysis Of Factor Affecting The Quality Of Government Financial Report Bengkalis Regency.</i> | Julita, Susilatri (2018) | Hasil penelitian ini berdasarkan pengujian hipotesis membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bengkalis. |

2.11 Kerangka Pemikiran

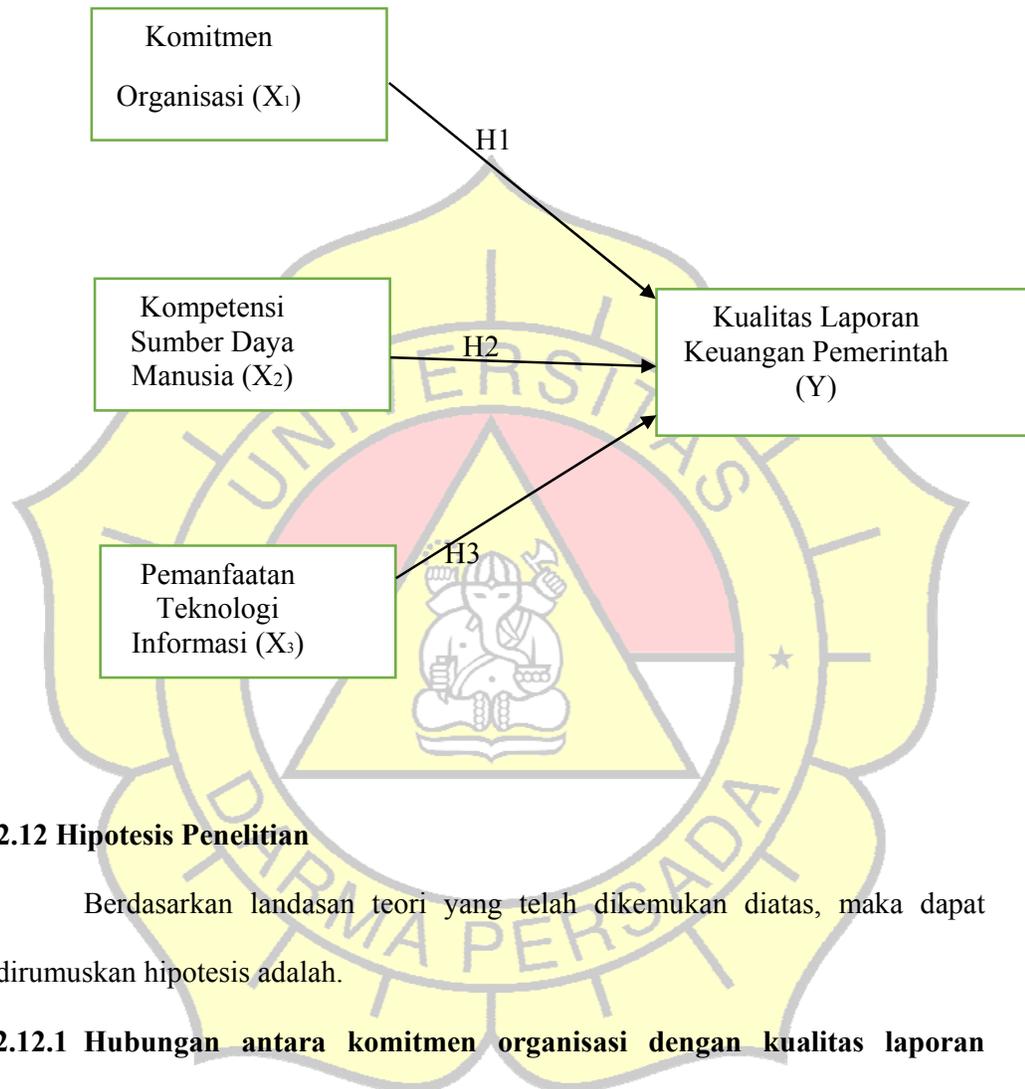
Guna mendapatkan kinerja organisasi yang baik dibutuhkan Kualitas laporan keuangan yang baik dengan opini kewajaran Wajar Tanpa Pengecualian, maka dari itu perlu diperhatikan hal-hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut. Berdasarkan pemikiran sementara hal-hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah komitmen organisasi, kompetensi pegawai dan pemanfaatan teknologi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan dengan variabel bebas yaitu komitmen organisasi, kompetensi pegawai dan pemanfaatan teknologi. Kerangka ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun kerangka konseptual penelitian digambarkan pada model berikut ini.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.12 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis adalah.

2.12.1 Hubungan antara komitmen organisasi dengan kualitas laporan keuangan

Komitmen organisasi berkaitan dengan tingkat keterlibatan orang dengan organisasi dimana mereka bekerja dan tertarik untuk tinggal didalam organisasi tersebut (Wibowo, 2017). Komitmen yang semakin tinggi terhadap organisasi akan memudahkan pekerjaan yang tersulit sekalipun. Seseorang yang memiliki kemauan

yang kuat dan melakukan tanggung jawab untuk menyelesaikan laporan keuangan, hal itu akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tanpa ada komitmen yang tinggi terhadap organisasi akan mengurangi kepedulian SDM untuk memberikan hasil yang terbaik terhadap tanggungjawabnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Noprial Valenra Maksyur,2015), komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

H1 : Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2.12.2 Hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan SDM melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya bekal pendidikan pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai (Marwansyah,2016,35). Pemerintah yang memiliki SDM yang berkompeten dalam hal pembuatan laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan karakteristik kualitatif. Penelitian Nurlis dan Winwin Yadiati (2017), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.

H2 : kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

2.12.3 Hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan

Berdasarkan penjelasan peraturan pemerintah nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dengan proses pengolahan data transaksi lebih tepat dan cepat dan menghindari kemungkinan kehilangan data laporan keuangan. Semakin bagus Teknologi Informasi yang digunakan tentunya kualitas laporan keuangan lebih berkualitas. Penelitian Muhamad Nuryanto dan Nunuy Nur Afiah (2013), menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan lebih besar dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi.

H3 : Pemanfaatan Teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.